



BankUdary

PT. BPR Ulatidana Rahayu



2025

**LAPORAN
KEBERLANJUTAN**

**SUSTAINABILITY
REPORT**

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	3
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan	10
2.1. Kinerja Ekonomi	10
2.2. Kinerja Lingkungan Hidup	11
2.3. Kinerja Sosial	15
2.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	15
3. Profil Bank	18
4. Penjelasan Direksi	21
5. Tata Kelola Keberlanjutan	28
Umpan Balik	33

Kata Pengantar

Di tahun 2025, BPR Ulatidana Rahayu telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 sesuai POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. BPR Ulatidana Rahayu menerapkan program- program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu *people* (kesejahteraan masyarakat), *profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).



BPR Ulatidana Rahayu sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat dituntut untuk bisa selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan menghindarkan pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup, fokus pada usaha debitur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga BPR mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga kredit.

Dalam hal ini BPR Ulatidana Rahayu berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai langkah bersama bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut Keberlanjutan Bank sebab ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko bagi Perbankan khususnya peningkatan risiko kredit akibat kegagalan bayar (*default*) debitur yang memiliki usaha berdampak negatif terhadap lingkungan dan kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (SR - *Sustainability Report*) BPR Ulatidana Rahayu Tahun 2025 ini berisi informasi mengenai kinerja keberlanjutan Bank dalam bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial kepada seluruh pemangku kepentingan. BPR Ulatidana Rahayu dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk kedua kalinya menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2026 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 dan wajib disampaikan ke OJK secara parallel run yaitu melalui APOLO dan luring (*offline*) paling lambat sesuai dengan batas waktu paling lambat tanggal 30 April 2026. Dengan demikian BPR Ulatidana Rahayu menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Pedoman Teknis Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.

1. Pendahuluan dan Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan



Sesuai POJK No. 51 /POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR/ BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR/ BPRS wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR (*Sustainability Report*) Tahun 2025 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2026 bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR/BPRS Tahun 2025.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR
4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan

6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.



Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan BPR Ulatidana Rahayu tahun 2025 disusun dengan mengkomodir standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun dengan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2025. BPR Ulatidana Rahayu membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2025 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BPR Ulatidana Rahayu tahun 2025 ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/ POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip isi dan kualitas.

Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi Bank.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Bank sehingga diyakini akurasinya.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik- topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu-isu yang berpengaruh signifikan bagi BPR Ulatidana Rahayu serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh BPR Ulatidana Rahayu adalah:

1. Investasi yang bertanggung jawab; adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisis potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan; Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan BPR Ulatidana Rahayu dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.

3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup ; Kami telah memiliki prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko-risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4. Prinsip Tata Kelola; Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.
5. Prinsip Komunikasi yang Informatif; Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web BPR Ulatidana Rahayu <https://www.bprgodital.co.id>
6. Prinsip Inklusif; Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan BPR Ulatidana Rahayu.
7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas ; Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi; Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang memberdayakan masyarakat.



Sedangkan tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan.
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan *awareness* mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional, antara lain menyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan



Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.

Segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, Bank berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - *Sustainable Development Goals*). Hal ini diwujudkan dalam berbagai upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, BPR Ulatidana Rahayu mulai menerapkan prinsip-prinsip *go green company* sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Mengampanyekan efisiensi penggunaan air di setiap toilet yang berada di lingkungan kantor BPR dengan memasang pamflet ““Gunakan air seperlunya”, “Hemat air”, atau “Matikan air setelah selesai digunakan””.
2. Mengampanyekan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dengan motto “BERSIH itu SEHAT” dengan memasang pamflet di tempat-tempat yang mudah terlihat. .
3. Menjalankan program “Hemat Energi” dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
4. Program penggunaan *tumbler* sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan.

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan

1. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan, Portofolio, Pendapatan dan Laba Rugi

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)			
Total Aset	160.335.765.522	117.219.841.997	89.977.977.985
Aset Produktif	157.172.623.702	115.140.435.973	89.028.658.840
Kredit/Pembiayaan Bank	113.554.816.535	83.160.113.199	53.770.791.804
Dana Pihak Ketiga	117.755.188.042	94.173.387.026	76.595.065.239
Pendapatan Operasional	19.507.677.538	13.592.397.718	10.557.481.836
Beban Operasional	13.648.192.463	10.173.449.223	7.906.749.094
Laba Bersih	4.649.430.070	2.705.296.597	2.121.631.065
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)	23,17	24,88	41,53
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,76	2,86	3,74
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,54	1,94	3,40
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif	0,78	0	0
NPL/NPF Gross	2,13	2,69	5,94
NPL/NPF Nett	1,85	2,05	5,40
Return on Asset (ROA)	4,19	3,37	3,21
Return on Equity (ROE)	26,86	22	19,39
Net Interest Margin (NIM)	8,75	8,35	7,69
Rasio Efisiensi (BOPO)	69,96	74,85	74,89
Loan to Deposit Ratio (LDR)	96,43	88,31	70,20

Kinerja Aspek Ekonomi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
a.1. DPK	-	-	-	-
a.2. Surat Berharga	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	1	1	1	1
b.1. Kredit / Pembiayaan	1	1	1	1
b.2. Surat Berharga	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Outstanding produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
a.1. DPK	-	-	-	-
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	4.086.871.859	12.186.000.000	5.773.690.000	4.204.200.000
b.1. Kredit / Pembiayaan	4.086.871.859	12.186.000.000	5.773.690.000	4.204.200.000
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Total Outstanding DPK (Rp)	-	-	-	-
Total Nominal Surat Berharga yang diterbitkan (Rp)	-	-	-	-
Total Outstanding Kredit Kepada Pihak Ketiga (Rp)	92.609.027.836	113.554.816.535	83.160.113.199	53.770.791.804
Total Nominal Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan				
a.1. DPK	-	-	-	-
a.2. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan (Kredit)				
b.1. Kredit / Pembiayaan	4,41%	10,73%	6,94%	7,82%

b.2. Surat Berharga yang dimiliki

- - - -

Persentase Total Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Portofolio (%)

Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	4.086.871.859	12.186.000.000	5.773.690.000	4.204.200.000
Total outstanding kredit/ pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (total a - l)	4.086.871.859	12.186.000.000	5.773.690.000	4.204.200.000

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL

BPR Ulatidana Rahayu mewujudkan operasional bank ramah lingkungan dengan menerapkan berbagai kebijakan sesuai prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sosialisasi atas prinsip-prinsip ini terus dilakukan agar tujuan awal yang ditetapkan Perusahaan tercapai. Operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/ material, energi, dan air agar semua bisa lebih efisien. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional BPR Ulatidana Rahayu tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di lingkungan BPR.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga menerapkan penggunaan bahan- bahan yang ramah lingkungan termasuk mengganti penggunaan gelas plastik dengan *tumbler* yang disiapkan pegawai masing-masing.

Penggunaan Energi (antara lain Air dan Listrik)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penggunaan Bahan Bakar (Liter)	-	8.816	9.451	9.263
b. Penggunaan Listrik (kWh)	-	28.417	30.390	21.417
c. Penggunaan Air (m3)	-	-	-	-
d. Penggunaan Kertas (kg)	-	322	523	288

Total Emisi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Scope 1 (Ton CO2)	-	-	-	-
b. Scope 2 (Ton CO2)	-	-	-	-
c. Scope 3 (Ton CO2)	-	-	-	-
c.1. Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
c.2. Non-Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
d. Pengurangan Emisi (Ton CO2)	-	-	-	-
Total Emisi Scope 1,2,3 (Ton CO2)	-	-	-	-
Total Limbah Dibuang (Ton CO2)	-	-	-	-
Kegiatan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Satuan Rupiah)	-	-	-	-

3. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan, Kinerja Sosial dan Keuangan Inklusi

Komitmen Perusahaan dan Kinerja Keuangan Inklusi

BPR Ulatidana Rahayu berkomitmen mendukung peningkatan keuangan inklusif sebagai bagian dari implementasi Keuangan Berkelanjutan. BPR meyakini bahwa akses terhadap layanan keuangan yang adil, terjangkau, dan merata merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari sisi kinerja keuangan, penyaluran kredit kepada segmen inklusif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total portofolio pembiayaan Perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi bisnis yang berorientasi pada keuangan inklusif tidak hanya memberikan dampak sosial yang positif, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Perkembangan Laku Pandai

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Jumlah Agen Laku Pandai	-	-	-	-
b. Jumlah Kepemilikan Rekening Tabungan (Basic Saving Account)	-	-	-	-
c. Jumlah Kepemilikan Rekening Kredit yang melalui referal Agen Laku Pandai	-	-	-	-

Kinerja Aspek Sosial Terkait Inklusivitas Ketenagakerjaan Internal Bank

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Pegawai Bank	-	29	27	26
Jumlah Direksi dan Komisaris (Total Jumlah Pria dan Wanita)	-	4	4	3
Jumlah Direksi dan Komisaris Pria	-	3	3	3
Jumlah Direksi dan Komisaris Wanita	-	1	1	-
Jumlah Pegawai Difable	-	-	-	-

Kinerja Aspek Sosial Terkait Dana Kegiatan Sosial Serta Keanggotaan Pada Asosiasi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Realisasi Dana Untuk Kegiatan Sosial (Satuan Rupiah)	-	10.372.000	8.506.000	6.565.000
Jumlah Keanggotaan pada Asosiasi	-	1	1	1

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR Ulatidana Rahayu berkomitmen untuk mengembangkan produk dan/ atau jasa keuangan yang sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam menjalankan komitmen tersebut, BPR memfokuskan pengembangan produk pada pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. BPR turut berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan produk pembiayaan yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan sektor yang belum terlayani oleh perbankan. Upaya ini diiringi dengan kegiatan edukasi dan pendampingan kepada nasabah guna meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab serta praktik usaha yang berkelanjutan.

Selain itu, BPR Ulatidana Rahayu juga mengembangkan program Credit Scoring dan Laporan Tahunan Berbasis WEB bekerja sama dengan Vendor

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

Semua produk dan jasa yang ditawarkan BPR Ulatidana Rahayu telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, BPR Ulatidana Rahayu secara continue menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) maupun secara tatap muka. Sejalan dengan itu, sesuai regulasi yang ada, BPR Ulatidana Rahayu juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/ jasa yang ditawarkan Perseroan. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut. Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan BPR Ulatidana Rahayu telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka BPR Ulatidana Rahayu akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan BPR Ulatidana Rahayu pada tahun pelaporan.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR Ulatidana Rahayu telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka BPR Ulatidana Rahayu akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan BPR Ulatidana Rahayu pada tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal BPR Ulatidana Rahayu maupun perintah dari regulator (OJK)

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR Ulatidana Rahayu belum melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2025 tidak ada complaint dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR Ulatidana Rahayu
Alamat	Jl. Prof. DR.IB.Mantra 77 X, Sukawati, Gianyar
Nomor Telepon	031858303
Email	udarybank@yahoo.co.id
Website	www.bprudary.com

Skala Usaha Bank

Total Aset dan Kewajiban

BPR Ulatidana Rahayu merupakan lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dengan fokus pada pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah operasional Perseroan. Mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait pengelompokan Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan skala usaha, BPR Ulatidana Rahayu termasuk dalam kategori BPRKU 2, yang ditentukan berdasarkan besaran modal inti dan/ atau total aset yang dimiliki Perseroan. Klasifikasi ini menjadi dasar dalam penetapan kompleksitas kegiatan usaha, penerapan manajemen risiko, serta pemenuhan aspek tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Per 31 Desember 2025, BPR Ulatidana Rahayu mencatat total aset sebesar Rp.160.335.765.522, dengan total penyaluran kredit sebesar Rp. 113.554.816.535 dan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp. 117.755.188.041. Kinerja tersebut mencerminkan kapasitas usaha Perseroan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dan berkelanjutan. Dalam mendukung kegiatan operasional, BPR memiliki 29 sumber daya manusia yang kompeten. Seiring dengan skala usaha yang dimiliki, Perseroan terus memperkuat infrastruktur, sistem, dan prosedur guna memastikan kegiatan operasional berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prin

sip kehati-hatian. Sebagai BPR dengan kategori BPRKU 2, BPR menyesuaikan strategi bisnis dan pengelolaan risiko secara proporsional, termasuk dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan. Perseroan juga mulai mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ ESG) dalam pengembangan usaha guna mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Produk dan Layanan

BPR Ulatidana Rahayu menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan yang dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh lembaga perbankan formal. Produk dan layanan Perseroan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja finansial, tetapi juga memperhatikan prinsip Keuangan Berkelanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG).

Produk Pembiayaan: Perseroan menyalurkan pembiayaan produktif yang bertujuan untuk mendukung usaha UMKM dan sektor ekonomi yang berdampak positif secara sosial. Produk pembiayaan ini dirancang dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan risiko lingkungan dan sosial, sehingga dapat mendorong kegiatan usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa produk pembiayaan meliputi:

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Investasi
3. Kredit Konsumtif

Produk Simpanan dan Tabungan : BPR Ulatidana Rahayu menyediakan berbagai pilihan simpanan yang fleksibel, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Produk ini dirancang untuk mendorong inklusi keuangan, mendukung literasi keuangan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan .

Beberapa produk Simpanan dan Tabungan meliputi:

1. Tabungan Umum
2. Tabungan Siultra
3. Deposito Berjangka

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

b. Misi Keberlanjutan

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup

c. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

Menjadi anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat)

Penjelasan Lainnya

BPR Ulatidana Rahayu mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan.

4. Penjelasan Direksi

Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Sebagai bagian dari komitmen terhadap nilai keberlanjutan, BPR berusaha menjadi lembaga keuangan yang tidak hanya unggul dalam memberikan layanan, tetapi juga terpercaya dalam berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam konteks ini, Bank mengintegrasikan nilai keberlanjutan sebagai prinsip yang mendasari semua kegiatan operasional, sehingga menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Nilai keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan (LJK) seperti BPR, emiten, dan perusahaan publik adalah dasar untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan hidup. Penerapan keuangan berkelanjutan ini mencakup langkah- langkah untuk memitigasi risiko sosial dan lingkungan, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pencapaian SDGs. Sebagai respons terhadap isu- isu terkait penerapan keuangan berkelanjutan, Bank secara aktif berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM yang relevan dengan kebutuhan strategis dan mendukung penerapan praktik terbaik dalam manajemen risiko. Selain itu, Bank berfokus pada pengintegrasian aspek sosial dan lingkungan ke dalam manajemen risiko untuk memastikan keberlanjutan dalam setiap keputusan yang diambil, terutama dalam hal penyaluran kredit dan pembiayaan. Peningkatan pertumbuhan portofolio kredit untuk sektor UMKM menjadi salah satu kunci strategi, di mana Bank memprioritaskan pemberian kredit kepada usaha- usaha yang ramah lingkungan. UMKM, yang memainkan peran besar dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadi sektor yang sangat relevan dengan komitmen Bank untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, Bank turut memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Kolaborasi antara penerapan prinsip keberlanjutan, pengembangan UMKM, dan pengelolaan risiko sosial serta lingkungan mencerminkan komitmen Bank dalam menjalankan Keuangan Berkelanjutan sesuai regulasi, sekaligus menunjukkan tanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPR menetapkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, Bank juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2025.

Target yang ditetapkan oleh Bank yaitu Mengimplementasikan operasional perbankan yang ramah lingkungan dalam seluruh kegiatan operasional (*green banking*).

Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional Bank yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha Bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat .
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Pencapaian Target

Dalam upaya mencapai target keuangan berkelanjutan, Bank terus mengembangkan strategi yang mengelola risiko terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Setiap risiko yang dihadapi, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, dikelola dengan hati-hati melalui tindakan mitigasi yang tepat, guna memastikan kelangsungan operasional Bank yang berkelanjutan. Bank menyadari bahwa penerapan keuangan berkelanjutan berpotensi menimbulkan risiko-risiko tertentu, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, kami terus berupaya mengelola risiko-risiko ini dengan pendekatan yang hati-hati, mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam sistem manajemen risiko yang sudah ada. Langkah ini membantu Bank mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis, serta memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan operasional. Meskipun tantangan yang ada, kami optimis bahwa penerapan prinsip keuangan berkelanjutan akan membuka peluang-peluang baru dalam pengalokasian dana. Peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan membuka potensi bagi Bank untuk berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan sektor UMKM, yang berperan penting dalam perekonomian. Kedepan, kami berharap dapat menjalin lebih banyak kerja sama dengan pemerintah, regulator, dan asosiasi untuk memperbesar dampak positif ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan.

Situasi eksternal yang mempengaruhi keberlanjutan Bank mencakup kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta perkembangan sosial dan lingkungan. Kebijakan pemerintah yang mendukung keberlanjutan, serta peraturan yang semakin mengedepankan keuangan berkelanjutan, memberikan peluang bagi Bank untuk memperluas dan memperdalam kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, perubahan kondisi sosial dan lingkungan yang cepat memerlukan respons yang adaptif agar Bank tetap dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta menjaga keberlanjutan usaha. Di masa mendatang, BPR Ulatidana Rahayu akan terus berfokus pada penerapan keuangan berkelanjutan, dengan beberapa langkah strategis, seperti:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keuangan berkelanjutan di seluruh tingkatan organisasi.
2. Membangun budaya kerja yang peduli terhadap lingkungan dan sosial dalam kegiatan operasional sehari-hari.
3. Mengembangkan produk-produk keuangan yang mendukung keberlanjutan.
4. Meningkatkan proporsi portofolio produk keuangan berkelanjutan untuk menciptakan dampak positif jangka panjang.

Keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan akan menjadi pilar utama dalam strategi kami, termasuk upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari aktivitas operasional dan bisnis perusahaan. Dengan komitmen ini, BPR Ulatidana Rahayu berharap dapat terus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Internal

1. Fokus Bisnis Bank

BPR memiliki fokus utama pada pembiayaan sektor UMKM dan masyarakat ritel. Tantangan yang muncul antara lain terkait karakteristik usaha nasabah yang beragam, keterbatasan data mengenai kelayakan usaha, serta risiko kredit pada debitur mikro.

2. Operasional Bank

Meningkatnya volume transaksi dan kebutuhan layanan digital menuntut penguatan infrastruktur dan integrasi teknologi informasi. Tantangan internal berupa keterbatasan sistem operasional dan prosedur yang perlu disesuaikan untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

3. Kebijakan Internal

Penyusunan dan penerapan kebijakan internal terkait Keuangan Berkelanjutan, tata kelola, dan manajemen risiko lingkungan dan sosial masih dalam tahap penguatan. Beberapa kebijakan perlu disempurnakan agar lebih efektif dalam mendukung pengambilan keputusan yang selaras dengan prinsip ESG.

4. Keahlian SDM Bank

Kompetensi karyawan dalam memahami prinsip ESG, manajemen risiko, dan pengembangan produk keuangan berkelanjutan menjadi tantangan yang perlu ditangani agar implementasi keberlanjutan lebih efektif.

5. Lainnya

Tantangan tambahan termasuk keterbatasan sumber daya untuk pengembangan produk hijau atau layanan inklusi keuangan, serta koordinasi lintas fungsi untuk memastikan integrasi keberlanjutan dalam seluruh lini operasional.

Upaya yang dilakukan

Bagi BPR Ulatidana Rahayu menyadari bahwa penerapan keuangan berkelanjutan bukan sekedar memenuhi POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan, tetapi bagaimana membuat prinsip tersebut realistis dijalankan dengan kapasitas Bank yang relatif terbatas. Karena itu, upaya yang dicoba dilakukan oleh dilakukan bersifat bertahap, praktis, dan menyesuaikan profil nasabah UMKM. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. BPR memperkuat proses analisis kredit dengan menggunakan sistem scoring yang lebih komprehensif dan melakukan pendampingan intensif kepada nasabah UMKM agar risiko kredit dapat diminimalkan.
2. BPR melakukan modernisasi sistem informasi, digitalisasi layanan, dan pelatihan karyawan terkait penggunaan teknologi, sekaligus mengadopsi praktik paperless untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan.
3. BPR meninjau dan menyempurnakan kebijakan internal, termasuk pedoman penyaluran kredit berkelanjutan, prosedur monitoring risiko, serta integrasi aspek ESG dalam proses pengambilan keputusan.

4. BPR menyelenggarakan pelatihan internal, workshop, dan program pengembangan kapasitas SDM untuk meningkatkan pemahaman terkait Keuangan Berkelanjutan, ESG, dan inovasi layanan keuangan inklusif.
5. BPR membentuk Team khusus Keuangan Berkelanjutan yang bertugas mengkoordinasikan strategi, pemantauan, dan evaluasi program keberlanjutan secara menyeluruh.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Eksternal

1. Kebijakan Pemerintah

Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, baik terkait sektor perbankan, pajak, maupun stimulus ekonomi, memerlukan penyesuaian cepat agar operasional tetap patuh dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perekonomian Nasional, Regional, dan Global

Perekonomian Nasional Kondisi ekonomi nasional, termasuk inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat, berpengaruh terhadap kemampuan bayar nasabah dan pertumbuhan portofolio pembiayaan. Perekonomian Regional dan Global Dinamika ekonomi regional dan global, seperti fluktuasi nilai tukar, harga komoditas, atau ketidakpastian ekonomi global, dapat berdampak pada sektor usaha nasabah dan likuiditas Perseroan.

3. Lainnya

Faktor eksternal lain, termasuk perubahan sosial, demografi, atau bencana alam, juga dapat mempengaruhi operasi dan keberlanjutan bisnis.

Upaya yang dilakukan

Untuk menghadapi tantangan eksternal dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR Ulatidana Rahayu menempuh langkah seperti meningkatkan komunikasi dengan regulator, mengikuti forum industri/ perbarindo, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pendekatan yang paling realistis sesuai kapasitas.

Berikut beberapa upaya yang lazim ditempuh oleh BPR Ulatidana Rahayu antara lain:

1. BPR secara aktif memantau kebijakan dan regulasi terbaru, mengikuti sosialisasi dari regulator, menyesuaikan kebijakan internal, serta memastikan seluruh kegiatan operasional dan penyaluran kredit memenuhi ketentuan pemerintah.
2. BPR melakukan analisis risiko makroekonomi secara berkala, menyesuaikan strategi pembiayaan, serta mengembangkan produk yang lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan segmen UMKM dan ritel.

3. BPR melakukan monitoring tren ekonomi regional dan global, menyiapkan strategi mitigasi risiko, serta diversifikasi portofolio pembiayaan untuk mengurangi dampak volatilitas eksternal.
4. BPR mengimplementasikan manajemen risiko lingkungan dan sosial, melakukan edukasi dan pendampingan nasabah, serta menyiapkan rencana kontinjensi untuk menjaga kelangsungan usaha.

5. Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

BPR Ulatidana Rahayu menempatkan tata kelola keberlanjutan sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan perusahaan. Perseroan memahami bahwa penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang efektif memerlukan struktur organisasi yang jelas, peran dan tanggung jawab yang terdefinisi, serta koordinasi yang baik antar unit kerja. Struktur tata kelola keberlanjutan BPR Ulatidana Rahayu meliputi:

Dewan Komisaris : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang- undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
- b. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Direksi : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang- undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
- b. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
- c. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) kepada Dewan Komisaris.
- d. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
- e. Memantau Pejabat Eksekutif satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan.

Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, BPR Ulatidana Rahayu berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Berkelanjutan dilakukan oleh Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Koordinator Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

A. Ketua (Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan):

1. Memastikan bahwa Team Khusus Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bersama-sama dengan Team Khusus Keuangan Berkelanjutan merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan kepada Direksi sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.

B. Koordinator (Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko)

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan seluruh anggota Team Khusus Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB);
 - b. Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan
 - c. Penyusunan Laporan Berkelanjutan;
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut di atas kepada Ketua Team, Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
3. Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	1	1	1
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	1	1	1

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	1	1	1
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	1	1	1

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Program Pengembangan Bagi Internal Bank Pada Setiap Level Jabatan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Komisaris	-	-	-
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Direksi	-	-	-
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pejabat Eksekutif	-	-	-
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pegawai	-	-	-

BPR berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi keuangan berkelanjutan sebagai bagian integral dari penerapan praktik keuangan yang bertanggung jawab dan sesuai prinsip ESG (Environment, Social, Governance). Pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk memastikan seluruh sumber daya manusia memiliki pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam mengelola produk, layanan, dan keputusan keuangan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan serta ketentuan OJK. Tata kelola pengembangan kompetensi dilakukan melalui beberapa langkah utama: Perencanaan Kompetensi – Melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi terkait keuangan berkelanjutan, termasuk risiko ESG, regulasi OJK, dan praktik terbaik industri. Hasilnya menjadi dasar penyusunan program pelatihan dan pengembangan. Pelaksanaan Program – Menyelenggarakan pelatihan, workshop, mentoring, dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kapasitas staf dalam pengambilan keputusan keuangan yang berkelanjutan. Monitoring dan Evaluasi – Mengevaluasi efektivitas program melalui indikator kinerja, sertifikasi peserta, dan implementasi praktik berkelanjutan dalam operasional. Hasil evaluasi ini dilaporkan secara transparan dalam laporan keberlanjutan kepada OJK. Kolaborasi dan Pembaharuan Kapasitas – Bekerja sama dengan lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan regulator untuk memastikan kompetensi staf selalu mutakhir dan relevan dengan perkembangan praktik keuangan berkelanjutan.

Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2025. Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan dan Penjelasan Terkait Pemangku Kepentingan

Pemegang Saham

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, peran pemegang saham di BPR Ulatidana Rahayu menentukan arah strategis BPR melalui kewenangan dalam RUPS, Penetapan Target Kinerja, Tingkat komitmen pemegang saham BPR yang tinggi mendorong BPR Ulatidana Rahayu untuk lebih disiplin melaksanakan Keuangan Berkelanjutan.

Pemerintah

Peran pemerintah dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) penting karena pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan, regulator, sekaligus penggerak ekosistem pembangunan ekonomi. Melalui peran ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan BPR Ulatidana Rahayu menerapkan prinsip keberlanjutan secara efektif tanpa mengabaikan kelangsungan usaha dan prinsip kehati-hatian.

Otoritas

OJK menerbitkan panduan teknis, contoh praktik, serta klasifikasi kegiatan usaha yang mendukung keberlanjutan. Materi ini membantu BPR Ulatidana Rahayu menerjemahkan konsep ESG ke dalam prosedur operasional sehari-hari.

Akademisi

1. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR Ulatidana Rahayu menambah pengetahuan dan referensi dari para akademisi yang akan dijalankan bank sehingga memiliki pendasaran ilmiah dan dapat terus disempurnakan.
2. Akademisi juga menghasilkan riset dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dapat menjadi rujukan bagi BPR Ulatidana Rahayu dalam menyusun kebijakan.

Praktisi

BPR Ulatidana Rahayu juga melakukan sharing experience dengan praktisi perbankan yang lebih awal dan berpengalaman dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan. Diharapkan Pengalaman dari bank atau lembaga lain membantu BPR Ulatidana Rahayu memahami pendekatan yang sudah terbukti berhasil, termasuk cara sederhana mengintegrasikan ESG tanpa membebani operasional

Pegawai

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan di BPR Ulatidana Rahayu, pegawai merupakan pelaku utama yang menentukan apakah kebijakan dapat berjalan atau hanya menjadi dokumen. Direksi dapat menetapkan strategi, namun pelaksanaan sehari-hari berada di tangan account officer, analis kredit, petugas operasional, manajemen risiko, hingga fungsi pendukung lainnya.

Nasabah

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, nasabah bukan hanya penerima Kredit / Pembiayaan, tetapi juga partner yang menentukan dampak nyata dari kegiatan bank terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Apa yang dilakukan nasabah setelah memperoleh kredit pada akhirnya membentuk kualitas portofolio keberlanjutan di BPR Ulatidana Rahayu.

Lainnya

Asosiasi perbankan/ Perbarindo berperan sebagai wadah koordinasi dan berbagi praktik baik antar BPR. Melalui forum ini, bank dapat memperoleh contoh implementasi termasuk melaksanakan gerakan menanam 1.000 pohon Kelapa, mengikuti pelatihan bersama, dan menyuarakan kendala kepada

regulator.

Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi BPR Ulatidana Rahayu yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, BPR Ulatidana Rahayu menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini.

Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan. BPR Ulatidana Rahayu memberikan akses informasi seluas- luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik (feedback) mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

Bapak I Made Suarja, SH.,MH.
Direktur Utama Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
Jl. Prof DR. IB. Mantra 77, Sukawati, Gianyar (0361) 466 166
Email udarybank@yahoo.co.id

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 ini merupakan yang pertama kali oleh karenanya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025
PT. BPR ULATIDANA RAHAYU**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

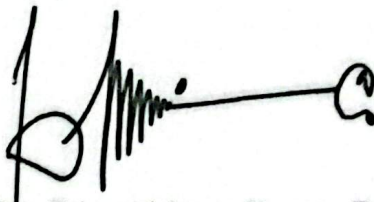
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gianyar, 06 April 2026
PT. BPR Ulatidana Rahayu

Direksi



I Made Suarja, SH.,MH
Direktur Utama



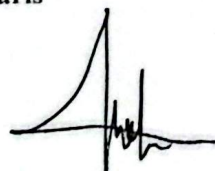
Ni Nym Trisyanti Angga Kusuma Dewi, SE.
Direktur

Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Dewan Komisaris



I Made Buda Astawa, SE.
Komisaris Utama



I Made Cangker Suarjana, SH
Komisaris